



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Dari 96 Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut diklasifikasikan dengan 11 jenis yang di random dengan teknik *proportional stratified random sampling* menjadi 32 fatwa, kemudian untuk diregulasi diukur dengan 4 (empat) kriteria penyerapan, yaitu:

- 1) Bahwa fatwa tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahwa fatwa diusulkan oleh operator (masyarakat industri) dan regulator (lembaga resmi yang berwenang), seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa keuangan (OJK) yang di tunjuk oleh Undang-Undang.
- 3) Bahwa fatwa menyangkut kepentingan umum masyarakat.
- 4) Bahwa fatwa dibuat secara rinci dan mendetail.

Setelah fatwa diukur dengan empat kriteria tersebut, kemudian fatwa dianalisis dengan menggunakan model *Miles dan Huberman*, sehingga ditemukan data 88% fatwa positif diregulasi dan hanya 12% fatwa negatif diregulasi.

2. Eksistensi Fatwa DSN-MUI berperan menunjang kesejahteraan perekonomian Indonesia sehingga eksistensinya termuat dalam sistem Peraturan Perundangan di Indonesia seperti terlihat dalam hierarki peraturan Perundangan yang dimuat dalam pasal 8 ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menunjuk Peraturan Bank Indonesia, dan kini kewenangan itu berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan pasal 55 Undang-undang No. 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini menetapkan bahwa keberadaan fatwa mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh jenis peraturan yang lebih tinggi seperti undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

B. Rekomendasi

Setelah meneliti dengan seksama tentang fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Kajian *Fiqh Syasah*, maka penulis mengajukan rekomendasi kepada :

1. Pemerintah agar memberikan support dalam mengimplementasikan fatwa DSN dengan membuat regulasi untuk tidak terjadinya *double taxation* dalam mengimplementasikan akad *murabahah* dan sekaligus menjadikan fatwa DSN menjadi acuan dalam membuat kebijakan ekonomi dan perbankan di Indonesia,
2. Demikian juga agar pemerintah mensupport lembaga negara untuk menggunakan perbankan syariah dalam kegiatan perekonomian mereka demi tegaknya keadilan dan pemerataan ekonomi dan keuangan, karena demokrasi ekonomi pasal 33 amanat UUD 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dalam melaksanakan dan mendorong kegiatan prinsip syariah dalam pembiayaan *murabahah* ini, sebaiknya pemerintah memberikan dispensasisertamembuat regulasi yang meringankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya balik nama dalam transaksinya,
4. Lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai mujtahid kolektifuntuk dapat menyempurnakan fatwa yang kurang sempurna konsiderans “menimbang”nya, seperti fatwa nomor 15 tentang Prinsip Distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS); dan belum adanya *qaidah fiqhiyah* dalam konsiderans “mengingat” pada fatwa Nomor 24 tentang *Safe Deposit Box* dan fatwa Nomor 28 tentang jual beli mata uang (*al-Sharf*).



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.